

**ANALISIS KEPENTINGAN PEMERINTAH DJIBOUTI
DALAM MENERIMA KEDATANGAN PANGKALAN
MILITER ASING TIONGKOK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional



Disusun oleh:

MOHAMMAD RAHADIAN SURYA

NIM: I72216070

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2020

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rahadian Surya
NIM : 172216070
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : **Analisis Kepentingan Pemerintah Djibouti
dalam Menerima Kedatangan Pangkalan Militer
Asing Tiongkok**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Penulis bersedia menanggung semua konsekuensi hukum bila ternyata pada kemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil plagiasi.

Surabaya, 5 Agustus 2020

Menyatakan


Mohammad Rahadian Surya
NIM. 172216070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang disusun oleh:

nama : Mohammad Rahadian Surya

NIM : I72216070

program studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: “**Analisis Kepentingan Pemerintah Djibouti dalam Menerima Kedatangan Pangkalan Militer Asing Tiongkok,**” saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 5 Agustus 2020
Pembimbing



Mohammad Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

PENGESAHAN

Skripsi oleh Mohammad Rahadian Surya dengan judul “**Analisis Kepentingan Pemerintah Djibouti dalam Menerima Kedatangan Pangkalan Militer Asing Tiongkok**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 22 Juli 2020.

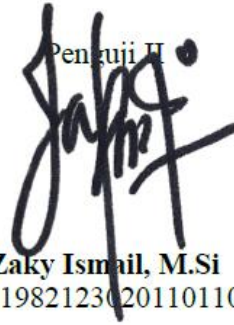
Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Mohammad Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji II



Zaky Ismail, M.Si
NIP. 198212302011011007

Penguji III



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.
NIP. 198408232015031002

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA., M.Ag, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Rahadian Surya
 NIM : I72216070
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) / Hubungan Internasional
 E-mail address : rahadiansurya28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

**Analisis Kepentingan Pemerintah Djibouti Dalam Menerima Kedatangan Pangkalan
 Militer Asing Tiongkok**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2020

Penulis

Mohammad Rahadian Surya

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian	31
B. Lokasi dan waktu penelitian	32
C. Tahapan penelitian	33
D. Subjek dan tingkatan analisis	34
E. Metode pengumpulan data	36
F. Metode analisis penelitian	36
G. Metode pemeriksaan keabsahan data	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Djibouti	40
B. Pangkalan militer luar negeri Tiongkok	47
C. Analisis Kepentingan Pemerintah Djibouti menggunakan <i>Rational Choice Theory</i>	56
1. Tujuan	57
2. Opsi	58
3. Konsekuensi	59
a. Menolak pangkalan militer Tiongkok di Djibouti	59
b. Menerima pangkalan militer Tiongkok di Djibouti	68
4. Pilihan	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

dan geo-strategis. Selain itu, di tinjauan pustaka kedua, peneliti juga menyinggung absennya *non-interference* Pemerintah Tiongkok yang termanifestasikan dalam kepentingan mereka untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Kedua penelitian tersebut berbeda dengan apa yang peneliti bahas dalam penelitian ini, mengingat apa yang peneliti bahas dalam penelitian ini adalah kepentingan Pemerintah Djibouti dalam menerima kedatangan pangkalan militer Tiongkok di negaranya. Maka dari itu, kedua penelitian tersebut peneliti operasionalkan menjadi tinjauan pustaka karena dapat berguna sebagai pelengkap sekaligus pembanding penelitian yang peneliti susun. Kedua tinjauan pustaka tersebut juga berguna dalam usaha peneliti untuk menyelaraskan kepentingan Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti dengan kepentingan Pemerintah Djibouti untuk menerima kedatangan militer Tiongkok di negaranya.

3. Artikel Jurnal yang disusun oleh Degang Sun dan Yahia H. Zoubir, berjudul *“The Eagle’s Nest in the Horn of Africa: US Military Strategic Deployment in Djibouti”*

Berbeda dengan tinjauan pustaka pertama dan kedua yang banyak membahas kedatangan dan kepentingan Tiongkok dalam membangun pangkalan militer di Djibouti, tinjauan pustaka ketiga dan keempat ini banyak membahas kepentingan Amerika Serikat dalam mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Penelitian ketiga yang peneliti tinjau adalah sebuah jurnal artikel berjudul *“The Eagle’s Nest in the Horn of Africa: US*

digagas oleh Bary Buzan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, Mardatilla menemukan bahwasannya kepentingan Inggris dalam mendirikan pangkalan militer adalah untuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah dengan menerapkan konsep *Balance of Power* terhadap Iran. Selain itu, Inggris memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan yang ada di Bahrain.

Tinjauan pustaka ini peneliti terapkan dengan maksud peneliti mendapatkan gambaran bagaimana kepentingan suatu negara dalam mengirim kedatangan angkatan bersenjata di luar wilayah yurisdiksi mereka, meskipun studi kasus dalam penelitian ini berbeda dengan fenomena yang dikaji dalam skripsi peneliti. Kepentingan yang ada dalam tinjauan pustaka ini adalah untuk mengimbangi kekuatan yang ada di kawasan Timur Tengah.

7. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Jusrianto, berjudul “Respon Timor Leste Terhadap Pembangunan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Darwin (Analisis Perilaku Small State terhadap Sumber Ancaman Great Powers).”

Tinjauan pustaka ketujuh merupakan skripsi yang membahas respon Timor Leste terhadap pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, yang mana dalam fenomena tersebut Jusrianto menyoroti pangkalan militer Amerika di Darwin sebagai *source of threat* bagi Timor

keinginan Pemerintah Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Pasalnya, Djibouti telah digunakan sebagai pangkalan militer dari banyak negara, yang keseluruhannya merupakan sekutu Amerika Serikat. Telah diketahui bahwasanya Amerika Serikat dengan Tiongkok berkali-kali terlibat dalam sengketa dan konflik. Argumentasi peneliti, bila sampai konflik terjadi, bukan tidak mungkin Djibouti akan menjadi ajang *show of force* dari kedua kekuatan dunia tersebut yang dapat mengganggu stabilitas Djibouti.

Menurut pandangan peneliti, alasan utama mengapa Djibouti pada akhirnya mengizinkan Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer adalah alasan ekonomi. Dengan menyerap segala potensi dari ekspansi perekonomian Tiongkok, seperti OBOR, diharapkan bahwa Djibouti dapat menerima segala manfaat tersebut. Salah satu manfaat yang dapat diterima oleh Djibouti adalah pembangunan infrastruktur melalui pinjaman atau asistensi dari Tiongkok, mengingat Tiongkok memandang Djibouti sebagai negara dengan posisi strategis bagi mega proyek OBOR. Untuk itulah, dengan pertimbangan ekonomi, Djibouti bersedia untuk mengizinkan Tiongkok mendirikan pangkalan di Djibouti, dengan harapan bahwa Pemerintah Djibouti mendapatkan asistensi dan bantuan keuangan dalam mengelola infrastruktur mereka. Selain itu, Djibouti juga mendapatkan biaya sewa atas berdirinya pangkalan militer Tiongkok di tanah mereka sendiri.

Untuk kepentingan politik dapat terbagi menjadi kemerdekaan politis, kedaulatan negara hingga status negara di dunia internasional. Namun, inti dari kategori kepentingan politik adalah kedaulatan negara di atas tanah mereka sendiri. Sementara itu, kepentingan keamanan dapat dibagi menjadi superioritas militer, keamanan wilayah, kepentingan maritim, dan lain-lain. Kepentingan ini sangatlah vital bagi kepentingan nasional suatu negara karena menyangkut keberlangsungan dan keselamatan baik negara maupun penduduk negara. Untuk kepentingan ekonomi dapat terbagi atas perdagangan, investasi asing, aktivitas ekonomi negara, dan lain-lain. Dalam kepentingan nasional, kepentingan ekonomi banyak dikatakan sebagai kepentingan yang paling fundamental daripada kepentingan-kepentingan lainnya. Kategori terakhir dalam kepentingan nasional adalah kepentingan kultur, yang terwujud dalam promosi kebudayaan, perlindungan dari paham atau ideologi asing dan lain-lain. Kepentingan ini merupakan kepentingan spiritual yang eksistensinya susah untuk dipahami.

Kepentingan nasional dianggap penting dalam menjalin hubungan suatu negara dengan negara lain. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri suatu negara berdasar pada kepentingan nasional negara tersebut. Melalui tujuan dan harapan suatu negara yang termanifestasi dalam kepentingan nasional, maka negara akan menentukan arah mereka menjalin hubungan dengan negara lain yang selaras dengan kepentingan nasional mereka.

Terdapat berbagai justifikasi suatu negara dalam mendirikan pangkalan militer di luar kedaulatannya, serta justifikasi bagi negara untuk menerima kedatangan militer asing. Dimulai dari yang pertama, bahwasannya membangun pangkalan militer di luar negara merupakan salah satu alat yang tepat untuk mendapatkan *sphere of influence*; yang berarti bahwa negara yang mendirikan pangkalan militer asing berhasil mendapatkan pengaruh mereka di negara dimana mereka mendirikan pangkalan militer asing, terlepas dari negara yang mendirikan pangkalan militer asing ingin memperluas pengaruh mereka di negara lain atau negara tersebut mengundang negara lain untuk mendirikan pangkalan militer demi masuk dalam pengaruh tersebut. Salah satu studi kasus yang dapat digunakan dalam memahami apa yang peneliti jabarkan dalam kalimat sebelum ini adalah Pangkalan Udara Militer Khmeimin di Suriah. Pemerintah Suriah telah memutuskan untuk mengundang Rusia untuk mendirikan pangkalan militer permanen di Khmeimin demi membendung pengaruh Amerika Serikat yang mendukung pihak oposisi Pemerintah Suriah, yang secara langsung membuat Suriah termasuk dalam pengaruh Rusia yang juga berusaha membendung pengaruh Amerika Serikat di Suriah.

Selain itu, pangkalan militer asing merupakan salah satu infrastruktur perang yang berguna untuk mendukung segala operasi militer baik itu operasi militer perang maupun operasi militer nir-perang yang terjadi di luar wilayah kedaulatan negara. Dengan adanya pangkalan militer

asing, kegiatan operasi militer dapat terbantu mengingat pangkalan militer mendukung logistik perang, serta menjadi batu loncatan dalam melakukan operasi militer.

Berdasarkan definisi yang telah peneliti paparkan, dapat dikatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan fasilitas militer dan logistik serta operasi militer merupakan pangkalan militer, seperti pangkalan militer Tiongkok yang ada di Djibouti, meski pemerintah Tiongkok menyebut fasilitas militer tersebut sebagai pusat logistik militer. Hal tersebut diperkuat dengan kedatangan militer Tiongkok yang membuat fasilitas logistik mereka, menurut peneliti, tidak nampak seperti fasilitas logistik. Bila melihat Gambar 1.2, terlihat kendaraan lapis baja 8x8 memiliki meriam berkaliber 30mm dan 105mm, kendaraan angkut personel serta prajurit bersenjata lengkap.

B. Rational Choice Theory oleh Graham T. Allison

Dalam menganalisis, peneliti akan menggunakan *Rational Choice Theory* yang digagas oleh Graham T. Allison sebagai kacamata utama dalam menganalisis isu yang diangkat. Dalam menganalisis isu menggunakan Allison *Rational Choice Theory*, peneliti akan menggunakan empat aspek yang ada dalam teori tersebut, yakni *goals and objectives* (tujuan), *options* (opsi), *consequences* (konsekuensi), dan *choice* (pilihan). Dengan data-data yang ada, maka peneliti akan menganalisis data dengan tiap-tiap aspek yang ada dalam Allison *Rational Choice Theory* secara berurutan.

Rational choice theory merupakan salah satu teori hubungan internasional yang berasumsi bahwa proses pengambilan keputusan suatu aktor hubungan internasional menggunakan pendekatan rasional. Menurut Andrew H. Kydd, aktor diasumsikan memiliki preferensi dari pilihan-pilihan serta *outcome* yang ada, yang kemudian pilihan tersebut diurutkan berdasarkan tingkat keinginan aktor terhadap suatu keputusan.²⁷ Menurut Graham T. Allison, aktor dalam *rational choice theory* diasumsikan bahwa mereka memiliki *goal* atau tujuan yang ingin dicapai.²⁸ Allison juga menekankan bahwasanya setelah menetapkan apa yang ingin dicapai, aktor akan mengkalkulasi serta mempertimbangkan segala opsi yang ada. Setelah menemukan pilihan yang paling rasional, aktor akan menggunakan segala strategi yang membuat kemungkinan aktor mendapatkan hasil yang terbaik atas pilihan yang diambil.

Selain dari penjelasan paragraf sebelumnya, Kydd dan Allison juga menjelaskan bahwa peranan informasi dan fakta dalam pemilihan keputusan yang rasional sangat diperlukan. Aktor akan mempertimbangkan segala fakta dan informasi yang ada di tiap-tiap pilihan rasional. Secara spesifik, Kydd menjelaskan bahwasanya informasi atas pilihan yang aktor ambil harus terus diperbarui, karena ketidakpastian akan nilai atau *outcome* preferensi dan pilihan-pilihan aktor bisa saja muncul. Khusus Allison, informasi terbaru atas

²⁷ Andrew H. Kydd. *Methodological Individualism and Rational Choice*. Dari "The Oxford Handbook of International Relations" (New York: Oxford University Press, 2008) hlm. 429

²⁸ Graham T. Allison. *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*. Jurnal "The American Political Science Review" Vol. 3 (JSTOR, 1969) hlm. 693

berbagai pilihan dibutuhkan untuk *value-maximizing*; yakni mengetahui pilihan yang memiliki nilai tertinggi dari berbagai pilihan yang ada.

Menurut Allison, konsepsi *rational choice theory* terbagi menjadi empat unsur, yaitu; *rational actor*, *problem*, *static selection* dan *action*. *Rational actor* dalam konsepsi Allison secara tidak langsung menegaskan bahwa aktor utama dalam teori ini adalah negara-bangsa. *Problem* merujuk pada permasalahan yang mendorong aktor untuk segera mengambil tindakan. *Static selection* merupakan kumpulan aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan permasalahan, yang mana tindakan tersebut dipahami sebagai solusi atas permasalahan. *Action* merupakan tindakan yang diambil oleh aktor, yang mana tindakan dalam beberapa komponen.

Adapun komponen *action* dalam *rational choice theory* menurut Allison adalah (1) *Goals and objectives*, (2) *Options*, (3) *Consequences*, (4) *Choice*. *Goals and objectives* dapat diartikan sebagai kepentingan nasional yang ingin dicapai secara rasional. Sedangkan opsi merupakan variasi tindakan yang relevan dengan tujuan aktor. Konsekuensi merupakan dampak atau untung rugi pada masing-masing opsi. Ibarat pepatah yang berbunyi “kita bebas memilih semua opsi yang ada, namun kita tidak bisa bebas dari konsekuensi atas opsi tersebut,” tiap-tiap opsi akan memiliki konsekuensi tersendiri. Pemegang keputusan haruslah jeli dalam melihat segala konsekuensi dari opsi yang ada mengingat tahapan ini merupakan tahapan terakhir teori ini. Salah mengambil opsi akan berujung pada pilihan yang memiliki konsekuensi buruk. Pilihan merupakan langkah terakhir bagi aktor

pembaca dapat memberikan penilaiannya secara gamblang. Dengan kata lain, langkah kedua ini peneliti mengalihkan penelitian ini kepada pembaca.

Setelah melewati langkah keteralihan, peneliti kemudian melakukan uji kebergantungan. Dalam pengujian ini, peneliti tidak hanya melakukan studi data atau pengumpulan data mentah saja, namun peneliti juga menyajikan analisis data beserta proses dalam menganalisisnya. Selain itu, peneliti akan mengkonsultasikan penelitian ini dengan dosen pembimbing. Dengan begitu, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang *dependable* atau memiliki unsur kebergantungan.

Langkah terakhir dalam metode pemeriksaan keabsahan data adalah uji kepastian. Pengujian ini menuntut peneliti untuk kembali memastikan data-data yang telah diperoleh, baik dari asal-usulnya hingga kredibilitas pihak yang menjadi sumber data penelitian ini. Peneliti juga mengecek kembali hasil analisis penelitian ini agar data yang telah diperoleh relevan dengan hasil penelitian ini.

serta proyek kereta api Djibouti-Addis Ababa melalui program *Belt and Road Initiative*.⁴⁸ Dengan fasilitas transit dan pelabuhan kapal yang mumpuni serta jalur kereta api yang menghubungkan Djibouti dengan negara sekitar, Djibouti dapat dikatakan sebagai pintu utama perekonomian yang ada di wilayah Tanduk Afrika mengingat negara sekitar Djibouti belum memiliki fasilitas dan infrastruktur sebaik Djibouti.

Sadar akan lokasi Djibouti yang strategis, pemerintah Djibouti kemudian memaksimalkan segala potensi geografis mereka sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara mereka dan meraih kepentingan nasionalnya. Walaupun begitu, kondisi yang ada di sekitar wilayah Djibouti tidak sepenuhnya mendukung Djibouti dalam meraih kepentingan nasional mereka. Wilayah perairan sekitar Djibouti terkenal akan perompakan kapal yang dapat mengganggu aktivitas lalu lintas perdagangan maritim. Hal tersebut diperparah dengan lemahnya lembaga penegakan hukum laut yang ada baik Djibouti maupun negara sekitar, seperti Somalia dengan pembajaknya dan kelompok bersenjata *al-Shabaab* dan Yaman yang sedang terjadi perang saudara. Kapabilitas ketiga negara tersebut belum mampu menangani permasalahan perompakan yang masih terjadi.

Dengan pertimbangan keamanan maritim wilayah perairan Djibouti yang begitu vital bagi perdagangan dunia, maka beberapa negara memutuskan untuk

⁴⁸ Lee Jeong-ho. *How the tiny African nation of Djibouti became the linchpin in China's belt and road plan*. Diakses dari situs "South China Morning Post" <https://scmp.com/news/china/diplomacy/article/3007924/how-tiny-african-nation-djibouti-became-linchpin-chinas-belt> pada 20 Maret 2020

melakukan operasi pengamanan di wilayah tersebut. Dapat dikatakan bahwa negara yang melakukan operasi tersebut merupakan negara yang memiliki kapabilitas angkatan bersenjata yang mumpuni dan mampu beroperasi jauh di luar wilayah kedaulatan mereka, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan beberapa negara yang tergabung dalam pakta pertahanan NATO. Namun, yang menjadi hambatan utama mereka dalam melakukan operasi keamanan maritim di perairan sekitar Djibouti adalah jarak antara wilayah operasi mereka dengan negara asal mereka yang begitu jauh. Hal tersebut membuat dukungan logistik bagi operasi tersebut sangatlah susah dan harus menempuh jarak yang cukup jauh.

Demi memudahkan operasi keamanan maritim di wilayah perairan sekitar Djibouti, maka negara yang ingin melakukan operasi tersebut harus memiliki pangkalan militer yang dekat dengan wilayah operasi, yang memiliki sarana dan prasarana pendukung operasi keamanan maritim. Pemerintah Djibouti melihat peluang tersebut, bahwa terdapat kemungkinan untuk 'membuka' negara mereka bagi negara yang ingin mendirikan pangkalan militer luar negeri. Dengan begitu, bilamana pangkalan militer asing yang ada di Djibouti mampu mendukung operasi pengamanan wilayah maritim yang ada di sekitar Djibouti dan operasi tersebut berjalan lancar, maka Djibouti akan diuntungkan dengan menurunnya aktivitas perompakan akibat dari operasi tersebut. Aktivitas maritim di wilayah maritim Djibouti akan berjalan dengan optimal dan mampu menambah devisa negara Djibouti.

Berbagai negara telah mendirikan pangkalan militer di Djibouti, bahkan banyak di antaranya berusaha untuk memperluas pangkalan militer serta mendatangkan lebih banyak aset-aset militer mereka di Djibouti. Wilayah perairan Djibouti, selat *Bab-el-Mandeb* dan Teluk *Aden*, merupakan wilayah perairan dengan lalu lintas maritim tersibuk di dunia. Tiap tahunnya, sekitar 21.000 hingga 30.000 kapal komersil yang membawa berbagai macam barang melalui wilayah perairan tersebut dan diprediksi akan terus meningkat.^{49 50} Wilayah perairan Djibouti merupakan rute tercepat bagi pelayaran kapal komersil dari benua Asia menuju benua Eropa, dan sebaliknya. Tidaklah heran bilaman selat *Bab-el Mandeb* serta teluk *Aden* merupakan jalur lalu lintas maritim tersibuk di dunia.

Dengan padatnya lalu lintas maritim yang ada, maka segala hambatan dan ancaman di wilayah perairan Djibouti dapat mengganggu salah satu ‘urat nadi’ perdagangan dunia. Ancaman perompakan kapal merupakan ancaman terbesar di wilayah perairan Djibouti dan sekitarnya. Perompak, yang kebanyakan berasal dari Somalia, memanfaatkan perairan yang tidak dijaga oleh negara-negara yang ada di sekitarnya. Kemampuan penegakan hukum maritim yang lemah serta konflik berkepanjangan di beberapa negara Tanduk Afrika membuat perompak dapat beraksi secara bebas. Hal tersebut mendorong beberapa negara untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti yang mampu mendukung inisiatif

⁴⁹ Reuters. *FACTBOX-The Dangerous Gulf of Aden*. Diakses dari situs “Reuters” <https://www.reuters.com/article/somalia-piracy-aden-idAFLDE70Q19S20110127> pada 18 September, 2019.

⁵⁰ Geoffrey Migiros. *Where Is the Gulf of Aden?* Diakses dari situs “World Atlas” <https://www.worldatlas.com/articles/where-is-the-gulf-of-aden.html> pada 18 September 2019.

sarana logistik serta tempat bersandarnya kapal-kapal perang PLAN serta menunjang baik operasi militer perang maupun selain perang di luar wilayah kedaulatan Tiongkok. Untuk itulah, sejak abad ke-21 ini, wacana terkait pembangunan pangkalan militer di luar negeri banyak digaungkan, antara lain di Sihanoukville (negara Kamboja), Gwadar (negara Pakistan), hingga Djibouti (negara Djibouti).⁶¹ Pada akhirnya, Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk mendirikan pangkalan militer di negara Djibouti sebagai pangkalan militer luar negeri mereka pertama. Kesepakatan antar kedua negara terhadap pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti terealisasi pada tahun 2013 atas permintaan Pemerintah Tiongkok.

Selain dari upaya untuk mewujudkan PLAN sebagai *blue-water navy*, terdapat alasan lain yang menggugah Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Alasan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan Tiongkok di wilayah perairan Teluk Aden. Wilayah perairan Teluk Aden merupakan wilayah perairan yang menjadi urat nadi perdagangan dunia, khususnya Tiongkok. Tiap tahun, Teluk Aden dilalui sekitar 21.000 hingga 30.000 kapal komersil yang mengangkut berbagai macam barang.^{62,63} Teluk Aden merupakan rute tercepat bagi pelayaran kapal komersil dari benua Asia menuju benua Eropa, dan sebaliknya. Selain perdagangan, Teluk Aden juga menjadi jalur

⁶¹ Al-Jazeera. *China to Increase Overseas Military Bases: Pentagon Report*. Diakses dari situs “al-Jazeera” <https://www.aljazeera.com/news/2019/05/china-increase-overseas-military-bases-pentagon-report-190503065146243.html> pada 18 September, 2019.

⁶² Reuters. *FACTBOOK-The Dangerous Gulf of Aden*. Diakses dari situs “Reuters” <https://www.reuters.com/article/somalia-piracy-aden-idAFLDE70Q19S20110127> pada 18 September, 2019.

⁶³ Geoffrey Migiros. *Where Is the Gulf of Aden?* Diakses dari situs “World Atlas” <https://www.worldatlas.com/articles/where-is-the-gulf-of-aden.html> pada 18 September 2019.

teakhir analisis *Rational Choice Theory*, peneliti dapat menemukan opsi mana yang paling rasional bagi aktor, yang dalam penelitian ini adalah pemerintah Djibouti.

Kebijakan pemerintah Djibouti dalam mengizinkan pemerintah Tiongkok untuk mengirimkan pasukan mereka serta membangun pangkalan militer di Djibouti merupakan pertanyaan mendasar dalam penelitian ini. Peneliti beranggapan bila pemerintah Tiongkok sebelumnya tidak berseteru dengan beberapa negara yang juga mendirikan pangkalan militer di Djibouti, mungkin tidak banyak pihak yang akan menyoroti berdirinya pangkalan militer Tiongkok di Djibouti. Faktanya, Tiongkok telah dan/atau sedang berseteru dengan negara lain yang juga mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Tiongkok berseteru dengan Amerika Serikat atas isu *One-China policy*, yang mana pemerintah Tiongkok menganggap bahwa Taiwan bukanlah suatu negara namun Amerika Serikat menganggap Taiwan merupakan negara yang merdeka. Selain isu *One-China policy*, Tiongkok juga terlibat sengketa wilayah pulau *Senkaku* (bahasa Jepang) / *Diayou* (bahasa Mandarin), yang mana Jepang dan Tiongkok sama-sama mengakui bahwa pulau tersebut merupakan pulau milik negara mereka.

1. Tujuan

Telah dibahas dalam kerangka konseptual bahwasannya *goals and objectives* merupakan langkah awal dalam menganalisa suatu fenomena internasional dengan ‘kacamata’ *rational choice* dari Allison. *Goals and Objectives* adalah tujuan utama atau kepentingan dari aktor yang ingin dicapai

atas suatu isu yang dihadapi. Kepentingan Pemerintah Djibouti dalam menerima kedatangan militer Tiongkok di Djibouti sempat diungkapkan dalam dokumentasi wawancara antara jurnalis CGTN dengan Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh, yang telah peneliti kutip sebelumnya: “*And we are also very pleased to host the first base of the People’s Liberation Army in Djibouti for international security, to fights against piracy, extremism, and terrorism.*” Jelas bahwasanya pemerintah Djibouti menginginkan berdirinya pangkalan militer dari negara-negara asing, termasuk dari Tiongkok, untuk *international security* (keamanan internasional), *fights again piracy, extremism, and terrorism* (melawan kegiatan perompakan, ekstrimisme, dan terorisme).

2. Opsi

Dalam menyikapi isu pangkalan militer asing yang ada di Djibouti, peneliti menganalisa opsi-opsi yang dipertimbangkan oleh pemerintah Djibouti. Peneliti mendapatkan kemungkinan dua opsi yang dimiliki oleh pemerintah Djibouti; Opsi pertama yakni menolak kedatangan militer Tiongkok di Djibouti dan opsi kedua yakni menerima kedatangan militer Tiongkok di Djibouti. Tiap-tiap opsi akan memiliki beberapa pertimbangan serta konsekuensi tersendiri, yang mana bila melihat alur analisa dengan teori *Rational Choice* milik Allison, maka konsekuensi merupakan alur analisa selanjutnya dalam *Rational Choice Teory* Allison.

bersenjata di Djibouti dapat berdampak pada persetujuan antar angkatan bersenjata dan mampu menimbulkan konflik. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan salah satu analis militer Zhou Chenming, “*The Chinese and US bases in Djibouti are really close, so one could disturb the other if the two sides don’t have a proper communication mechanism.*”⁷⁴ Pertimbangan dalam opsi ini adalah pemerintah Tiongkok sedang berseteru dengan negara yang juga mendirikan pangkalan militer di Djibouti, yakni Amerika Serikat dan Jepang. kedatangan militer Amerika Serikat cenderung besar dan pangkalan militer mereka di Djibouti telah ditetapkan sebagai pangkalan militer permanen dan pangkalan militer permanen satu-satunya di Afrika, yang mampu mendukung segala operasi baik operasi militer maupun operasi non-militer di sekitar wilayah Tanduk Afrika. Sebelumnya angkatan bersenjata Amerika Serikat dengan Tiongkok pernah terlibat gesekan di Laut Tiongkok Selatan.

Pada tahun 2001, pesawat pengintai milik Angkatan Laut Amerika Serikat EP-3E *signal intelligent* (SIGINT) terbang di wilayah perairan antara Hainan dengan kepulauan Parecel, Tiongkok. Kala itu, pesawat EP-3E terbang di atas wilayah udara LCS yang Tiongkok klaim sebagai wilayah udara mereka, sehingga keberadaan angkatan bersenjata lain harus ijin terlebih dahulu.⁷⁵ Mengingat Amerika Serikat memiliki pandangan

⁷⁴ Liu Zhen. *US warns airmen to beware of laser attacks near China’s military base in Djibouti*. Diakses dari South China Morning Post <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2144387/us-warns-airmen-beware-laser-attacks-near-chinas> pada 31 Mei 2020.

⁷⁵ Shirley A. Kan dkk., *China-U.S. Aircraft Collision Incident of April 2001: Assessments and Policy Implications*. “Congressional Research Service Report.” hlm. 1

pangkalan militer di Djibouti. Peneliti berargumen bahwasannya penolakan untuk membangun pangkalan militer Tiongkok dapat berujung pada menurunnya hubungan diplomatik kedua negara.

Hubungan diplomatik Tiongkok – Djibouti erat kaitannya dengan ekonomi. Terdapat kemungkinan kehilangan peluang ekonomi dari hubungan diplomatik Tiongkok- Djibouti bila Djibouti tidak menerima permintaan pemerintah Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Dengan ambisi untuk menjadi negara yang bergerak di sektor jasa layaknya Singapura, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh, “*We want to follow the path of Singapore,*” Djibouti membutuhkan investasi untuk mendukung ambisi tersebut sekitar US\$12,4 miliar.⁸⁷ Dana tersebut digunakan untuk meremajakan infrastruktur yang ada serta membangun infrastruktur-infrastruktur yang baru. Permasalahannya adalah tidak banyak pihak yang segan untuk menanamkan uangnya di Djibouti atau meminjamkan uangnya untuk program tersebut. Namun, Tiongkok pada akhirnya setuju untuk membantu Djibouti untuk mewujudkan ambisi mereka dengan memberi pinjaman dana bagi program infrastruktur mereka. Pemerintah Tiongkok telah menyediakan pinjaman sebesar US\$ 1,4 miliar melalui program *Belt and Road Initiatives*, atau sekitar 9% dari biaya yang dibutuhkan

⁸⁷ Edmund Blair. *China to Start Work Soon on Naval Base in Djibouti – Guelleh*. Diakses dari “Reuters” <https://www.reuters.com/article/uk-djibouti-china/china-to-start-work-soon-on-naval-base-in-djibouti-guelleh-idUKKCN0VB1Z6> pada 5 April 2020.

Sebelumnya Amerika Serikat telah memaparkan bahwa *database* militer mereka yang terdiri atas informasi rahasia milik Angkatan Laut Amerika Serikat hingga lembaga antariksa NASA telah diretas oleh peretas dari Tiongkok.⁹¹ Bila pemerintah Djibouti menolak pembangunan pangkalan militer Tiongkok, maka dapat dipastikan bahwa resiko-resiko bagi Amerika Serikat yang telah peneliti jabarkan akan semakin minim, dan hubungan strategis antar kedua negara akan semakin meningkat.

b. Menerima pangkalan militer Tiongkok di Djibouti

Pertama, konsekuensi menerima kedatangan militer Tiongkok di Djibouti adalah meningkatnya hubungan bilateral antar kedua negara. Djibouti dan Tiongkok telah menjalin hubungan diplomatik pada 8 Januari, 1979 atau satu setengah tahun setelah Djibouti merdeka.⁹² Hubungan kedua negara dikatakan cenderung erat ketika banyak pejabat pemerintah dari kedua negara berkali-kali mengunjungi negara satu sama lain. Bahkan, pada tahun 2017 Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh menjadi presiden dari benua Afrika pertama yang menghadiri Kongres

⁹¹ Kevin Johnson. *Chinese Hackers Accused of Breaching US Military, Government Systems in Global Campaign Linked to Beijing Government*. Diakses dari situs "USA Today" <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2018/12/20/feds-charge-chinese-hackers-intensify-pressure-beijing/2373826002/> pada 13 April 2020

⁹² Anon. *Djibouti*. Diakses dari situs "China.org.cn" <http://www.china.org.cn/english/features/focac/183543.htm> pada 27 Juni 2020

Partai Komunis Tiongkok.⁹³ Hal tersebut merupakan kesempatan yang mungkin tidak dapat diperoleh petinggi atau pejabat dari negara lain.

Semenjak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1979, berbagai kerjasama kedua negara telah terjalin, antara lain bantuan Tiongkok untuk membangun Istana Kepresidenan Djibouti, monumen, stadium, proyek perumahan, hingga kantor Kementerian Luar Negeri Djibouti.⁹⁴ Hubungan diplomatik yang meningkat akibat dari menerima kedatangan militer Tiongkok di Djibouti juga erat kaitannya dengan hubungan ekonomi kedua negara, yang akan banyak dibahas dalam konsekuensi kedua dari opsi ini. Dapat dipastikan, pangkalan militer Tiongkok yang ada di Djibouti dapat mendatangkan peluang ekonomi yang besar bagi Djibouti.

Kedua, dibangunnya pangkalan militer Tiongkok di Djibouti dapat mendatangkan lebih banyak investor dari Tiongkok. Investasi dari Tiongkok sangat masif di Djibouti daripada investasi-investasi dari negara lain.⁹⁵ Hal tersebut menandakan bahwa tidak banyak negara yang ingin menanamkan modal serta memberi pinjaman uang bagi Djibouti selain Tiongkok. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Djibouti,

“They (China) are the biggest investors in our country ... They are the ones who were sensitive to

⁹³ Su Yuting. *China, Djibouti Presidents Agree to Establish Strategic Partnership*. Diakses dari situs “Youtube: CGTN Africa” <https://www.youtube.com/watch?v=5JEkrUt6IUA> pada 27 Juni 2020

⁹⁴ Anon. *Djibouti*. Diakses dari situs “China.org.cn” <http://www.china.org.cn/english/features/focac/183543.htm> pada 27 Juni 2020

⁹⁵ Monty Khanna. *The Shifting Sands of Djibouti*. Dari “Observer Research Foundation Issue Brief no.331, Desember 2019.” hlm. 4

bahwa PLA mampu melindungi dan mengevakuasi masyarakat Tiongkok di negara yang sarat akan konflik.⁹⁹

Sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang mampu menyokong perekonomiannya, pemerintah Djibouti harus memutar otak untuk mencari potensi lain yang dapat menjadi sumber pendapatan negara. Salah satu potensi tersebut adalah kondisi geografis. Djibouti merupakan gerbang masuk bagi negara-negara *landlocked* (negara yang tidak memiliki wilayah maritim) seperti Ethiopia, Sudan Selatan, dan Uganda. Demi memaksimalkan potensi tersebut, Djibouti memerlukan infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur maritim dan infrastruktur darat yang menghubungkan negara-negara *landlocked* tersebut dengan wilayah maritim Djibouti. Meskipun begitu, rencana tersebut dapat terealisasi bila terdapat investasi asing atau pinjaman asing yang ingin berinvestasi di sektor infrastruktur Djibouti. Di sinilah peran negara lain, seperti Tiongkok, untuk pembangunan infrastruktur Djibouti bermula. Banyaknya investasi asing di Djibouti tidak lepas dari perekonomian Djibouti yang dominan di bidang jasa.¹⁰⁰ Mereka membutuhkan dana yang banyak untuk membangun infrastruktur guna mendukung perekonomian mereka. Pemerintah Tiongkok datang dengan program *Belt and Road*

⁹⁹ Agence France-Presse. *Another 'Great Game': Why China's PLA is jostling for position with the world's armed forces in tiny Djibouti*. Diakses dari situs "South China Morning Post" <https://www.scmp.com/news/world/africa/article/1933505/another-great-game-why-chinas-pla-jostling-position-worlds-armed> pada 31 Mei 2020.

¹⁰⁰ Central Intelligence Agency World Factbook. *Djibouti*. Diakses dari situs "World Factbook" https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_dj.html pada 23 Juni 2020

Initiative dan pemerintah Tiongkok bersedia untuk memberi pinjaman uang guna membantu program pemerintah Djibouti, yang mana Djibouti sendiri tidak mampu membiayai seluruh program tersebut.

Adapun infrastruktur yang diperlukan adalah jalur kereta api yang menghubungkan Djibouti dengan negara tetangga serta pelabuhan laut dalam yang mampu menangani kargo baik ekspor maupun impor. Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk memberikan dana segar bagi Djibouti untuk pembangunan infrastruktur mereka. Salah satu proyek infrastruktur yang didanai pemerintah Tiongkok adalah jalur kereta api yang menghubungkan Ibukota Ethiopia, Addis Ababa dengan Djibouti. Dari US\$490 juta biaya yang diperlukan untuk proyek kereta api tersebut, 70 persen dari pembiayaan tersebut dari dana pinjaman Tiongkok.¹⁰¹ Selain itu, salah satu infrastruktur penting bagi Djibouti adalah pelabuhan laut dalam *Doraleh*. Pelabuhan *Doraleh* merupakan salah satu infrastruktur yang penting tidak hanya bagi Djibouti, namun juga bagi negara lain. Proyek pelabuhan *Doraleh* yang bernama *Doraleh Multipurpose Port* tersebut didanai oleh pemerintah Tiongkok sebesar US\$ 590 juta.¹⁰² Dibangunnya *Doraleh Multipurpose Port* membuat negara-negara *landlocked* di sekitar Djibouti dapat melakukan kegiatan ekspor-impor melalui jalur laut. Djibouti juga menerima investasi asing

¹⁰¹ Yun Sun. *China and the East Africa Railways: Beyond Full Industry Chain Export*. Diakses dari situs “Brookings Institution” Diakses dari <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2017/07/06/china-and-the-east-africa-railways-beyond-full-industry-chain-export/> pada 23 Juni 2020

¹⁰² Monty Khanna. *The Shifting Sands of Djibouti*. “Observer Research Foundation Issue Brief no.331, Desember 2019.” hlm. 5

Berdasarkan seluruh konsekuensi baik itu positif dan negatif dari seluruh opsi-opsi dalam pengambilan keputusan, bila merujuk sudut pandang penelitian ini, maka opsi kedua merupakan opsi yang harus diambil bagi pemerintah Djibouti. Seperti yang telah peneliti jabarkan di Bab III, *Rational Choice theory* erat hubungannya dengan *value-maximizing* dan pemilahan untung-rugi suatu opsi sebelum menentukan pilihan. Dengan begitu, aktor akan memilih opsi dengan nilai yang paling banyak.

Opsi kedua, yang mana memiliki konsekuensi positif lebih banyak daripada opsi yang lain, merupakan keputusan yang dipandang lebih rasional. Dengan kata lain, *value* atau nilai dari opsi kedua lebih besar daripada opsi yang lain. Pemerintah Djibouti memutuskan untuk memberikan lampu hijau bagi pemerintah Tiongkok untuk membangun dengan berbagai pertimbangan yang telah peneliti analisis, antara lain: pertimbangan dampak ekonomi dari pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti. Dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh pemerintah Djibouti adalah biaya sewa lahan yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer asing. Sebagai negara yang belum lama mendirikan pangkalan militer, nyatanya pemerintah Tiongkok memutuskan untuk memperluas wilayah pangkalan militer mereka di Djibouti, yang tentu saja akan mendatangkan uang lebih banyak bagi Djibouti. Dampak ekonomi secara tidak langsung yang mungkin akan didapat adalah peluang investasi dari Tiongkok yang semakin besar. Adanya pangkalan militer Tiongkok dapat menjamin keamanan bagi ekspatriat, pebisnis, hingga investasi Tiongkok yang ada di

- Wong, John Power and Catherine. 2018. *Exclusive Details and Footage Emerge of Near Collision between Warships in South China Sea*. 4 November. Diakses 12 April, 2020. <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2171596/exclusive-details-and-footage-emerge-near-collision-between>.
- Youssef, Mahamoud Ali. 2016. *We Welcome China in Djibouti, Just As We Welcomed the West*. 16 Agustus. Diakses 17 Februari, 2020. <https://www.defenseone.com/ideas/2016/08/we-welcome-china-djibouti-just-we-welcomed-west/130765/>.
- Yuting, Su. 2017. *China, Djibouti Presidents Agree to Establish Strategic Partnership*. 23 November. Diakses 27 Juni, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=5JEkrUt6IUA>.
- Zhen, Liu. 2018. *US warns airmen to beware of laser attacks near China's military base in Djibouti*. 2 Mei. Diakses 31 Mei, 2020. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2144387/us-warns-airmen-beware-laser-attacks-near-chinas>.
- Zissis, Carin. 2006. *Modernizing the People's Liberation Army of China*. 5 Desember. Diakses 17 September, 2019. <https://www.cfr.org/background/modernizing-peoples-liberation-army-china>.